

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Rival, dkk. 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Amir, Ari Yusuf. 2010. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Cet. Ke-3. Yogyakarta: Navila Idea.
- Amirin, Tatang M. 1986. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali.
- Amiruddin dan Asikin, Zaenal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M. Ali. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Atmasasmita, Rombi. 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Putra A Bardin.
- Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. 1977. *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2014. *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, St.Paul: West.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaelan dan Zubaidi, Achmad. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, 2014. *Kritisi Rancangan UUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, Jakarta: KKPI.
- Kelompok Kerja Paralegal, *Working Paper: Kritisi RUUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, Jakarta.

- Kelsen, Hans. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kusuma, Hilman Hadi. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Muchsin, 2003. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Surakarta: *Disertasi S2 Fakultas Hukum*, Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Pangaribuan, Luhut. 2013. *Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2014. *Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. 2017. *Kemiskinan Sebagai Masalah Bersama Umat Manusia dalam Program CBD Bali Sejahtera*, Plawasari, Denpasar.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Simorangkir, J.C.T. dan Sastropranoto, Woerjono. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunardi. 1999. *Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan*, Bandung: PT. Mandar Maju.
- Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan Dillah, Philip. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta..

- Winarta, Frans Hendra. 1995. *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI.
- Winarta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Winarta, Frans Hendra. 2009. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), 2013. *Bantuan Hukum, Bukan Hak Yang Diberi*, Jakarta: YLBHI.

Karya Ilmiah/Jurnal

- Abdurrachman, Hamidah. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 17 Juli 2010: 475-49.
- Hani Barizatul Baroroh, S.HI, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt):, *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No. 1, 2012.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari. 2014, “Bantuan Hukum Bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum yang Adil di Denpasar, Denpasar”, *Tesis*, Denpasar: Universitas Udayana.
- Kuswardani dan Fajar Ilhamsyah, “Penal Mediation in the Tourist Accident Case”, *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, Vol. 52, No. 1, 2020, halaman 164 –172, <http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplie>.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. 2015. “Analisis Konteks dalam Epistemologi Ilmu Hukum; Suatu Model Penerapan dalam Pengaturan Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional Indonesia”, *Skripsi*. Universitas Udayana, Denpasar, hal.4
- Setiono. 2004. “*Rule of Law*”, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Jurnal/Internet/Website/Koran

- Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, *Republika*, 24 Mei 2004, diakses tanggal 30 November 2019.
- FOKUS (Forum Keadilan Untuk Semua), *Bantuan Hukum Untuk Semua, Brief Paper tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya*,

<http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/FOKUS-Bantuan-Hukum-Untuk-Semua.pdf>, diunduh 29 November 2019, pukul 20.30 WIB.

Hasanah, Hetty. 2009. “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses pada 12 Maret 2019 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/> perlindungan.html.

Nusantara, Gede Agung Wirawan. 2011. “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin pada Peradilan Pidana”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Ramdan, Ajie. 2014. “Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional”, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hlm 247-249.

Roudlatul Jannah & Kuswardan, 2020, “Urgensi Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Perempuan Korban Kekerasan”, *Prosiding FH Universitas Suryakencana Tahun 2020*, dalam <https://jurnal.fhukum.unsur.ac.id/prosiding/article/view/442>, akses Rabu 23 Desember 2020

Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi, 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Rahayu, 2009, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.